

PEMANFAATAN LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI

Habibullah

ABSTRAK

Kegagalan berbagai program penanganan kemiskinan masyarakat sekitar hutan tidak terlepas dari kesalahan dalam mengidentifikasi pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam karena masyarakat sekitar hutan mempunyai pola pemanfaatan yang berbeda dengan masyarakat desa yang berbasis pertanian sawah umumnya sehingga pemahaman yang tepat terhadap sumber daya yang tersedia akan dapat menuntun langkah yang tepat pula dalam pembangunan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya alam yang dikembangkan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber penghidupan tanpa merusak lingkungan hidup. Kajian bersifat deskriptif ini dilaksanakan di 4 (empat) desa sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.

Hasil kajian menunjukkan sebagian besar masyarakat desa memanfaatkan lahan untuk mengembangkan komoditas karet walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat kendala sosial-ekonomi antara lain masyarakat terjebak dengan pinjaman (barang dan uang) yang diberikan tauke sehingga harga karet ditentukan oleh tauke sementara itu KUD yang semestinya dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat belum mempunyai peranan kecuali hanya sebagai "kedok" untuk memanfaatkan hasil hutan. Hasil studi ini merekomendasikan berbagai program Departemen Sosial untuk masyarakat sekitar hutan lebih mempertimbangkan aspek pola-pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam sehingga program tersebut tepat sasaran dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Masyarakat sekitar hutan, pembangunan masyarakat, pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, karet

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa otonomi daerah yang bersamaan dengan lahirnya berbagai tuntutan reformasi, pemanfaatan sumber daya hutan menjadi krusial. Harapan besar terhadap sumber daya hutan mengakibatkan sektor ini masih menjadi tumpuan untuk dapat menghasilkan pendapatan. Permasalahan ini ditambah lagi dengan kenyataan sektor perkebunan sawit oleh swasta kurang mempertimbangkan *opportunity cost* yang akan muncul, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Memberikan porsi ruang berlebihan di salah satu aspek seperti aspek perkebunan dan aspek ekonomi lainnya akan memberikan kerugian pada aspek keruangan lain seperti aspek ekologi dan sosial ekonomi.

Pada aspek sosial ekonomi perubahan fungsi-fungsi keruangan yang terjadi tidak serta-merta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan, terutama masyarakat asli. Banyak kasus-kasus konflik lahan antara masyarakat dengan perkebunan sebagai buah dari kebijakan keruangan yang memarginalkan masyarakat sekitar hutan. Resiko terbesar akibat kehilangan sumber daya alam justru menjadi beban masyarakat sehingga manfaat sesaat secara finansial menjadi hilang maknanya dan masyarakat sekitar hutan tetap miskin.

Departemen Sosial telah mengimplementasikan berbagai program penanganan kemiskinan seperti: Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS), Program Kesejahteraan Sosial KUBE (Prokessos KUBE), Program Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya. Salah satu sasaran program penanganan kemiskinan

yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial adalah masyarakat sekitar hutan. Namun seringkali dalam implementasinya program-program tersebut salah sasaran, timbul benih-benih fragmentasi sosial dan belum menyentuh akar permasalahan salah satu penyebabnya adalah program tersebut tidak mempertimbangkan pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam desa sekitar hutan. Melalui garapan tata ruang desa ini akan diketahui potensi ekonomi strategis dan mungkin dikembangkan, termasuk masalah ketersediaan lahan dan konflik lahan.

Pembangunan masyarakat sebagai usaha untuk menciptakan hubungan serasi antara sumber-sumber yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Apabila hubungan harmonis tersebut dapat terwujud maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud pula, apabila yang terjadi sebaliknya maka akan ditemukan adanya berbagai bentuk masalah sosial (Soetomo, 2006). Identifikasi sumber daya merupakan salah satu langkah strategis dalam proses pembangunan masyarakat. Pemahaman yang tepat terhadap sumber daya yang tersedia akan dapat menuntun langkah yang tepat pula. Tidak jarang dijumpai suatu kenyataan ironis bahwa dalam masyarakat tersedia sumber daya cukup besar, tetapi tetap bersifat laten dalam jangka waktu cukup lama oleh karena masyarakat belum menyadari keberadaannya sementara itu kondisi kehidupan masyarakat demikian buruknya sehingga membutuhkan perbaikan kehidupan. Oleh sebab itu, identifikasi sumber daya berfungsi untuk mengangkat sumber daya terpendam ke atas permukaan realitas sosial sehingga dapat segera dimanfaatkan dalam rangka peningkatan taraf hidup. Dengan kata lain, identifikasi sumber daya juga dapat berarti mengubah sumber daya yang masih laten menjadi manifes.

B. Metodologi Penelitian

Kajian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan masyarakat desa sekitar hutan dalam memanfaatkan lahan dan sumber daya alam. Penentuan lokasi ditetapkan secara *purposive*, yakni desa-desa interaksi Taman Nasional Bukit Duabelas yang mempunyai potensi lahan dan sumber daya alam sekaligus menjadi ancaman bagi Taman Nasional Bukit Duabelas. Desa-desa penelitian terletak di

Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari. Desa penelitian adalah 1) Padang Kelapo, 2) Sungai Ruan Ulu di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan 3) Jelutih, dan 4) Hajran di Kecamatan Bathin XXIV.

Penetapan responden dengan menggunakan metode kuantitatif dalam kajian ini ditetapkan secara *purposive*, yakni 10% kepala keluarga (kk) dari masing-masing desa: Padang Kelapo mempunyai 286 kk ditetapkan 29 responden, Sungai Ruan Ulu mempunyai 445 kk ditetapkan 44 responden, Jelutih mempunyai 653 kk ditetapkan 66 responden dan Hajran mempunyai 158 kk ditetapkan 16 responden. Penetapan 10% kepala keluarga sebagai responden sudah dianggap cukup menggambarkan keseluruhan keadaan kepala keluarga di masing-masing desa, untuk itu digunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data.

Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang berbagai hal yang mengakibatkan munculnya satu kejadian, yang memberikan gambaran tentang variabel penelitian. Teknik yang digunakan meliputi *interview mendalam*, *kelompok diskusi* dan *triangulasi*. Selain metode tersebut juga digunakan metode partisipatif melalui kegiatan *workshop* di desa yang dimaksudkan untuk mengamati perhatian masyarakat desa pada sumber daya desa dan bagaimana mereka merencanakannya. Sedangkan pengamatan untuk melengkapi unit analisis tersebut dilakukan terhadap desa dan lembaga-lembaga yang terdapat di lokasi penelitian.

II. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Keadaan Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa-desa Penelitian

Desa-desa penelitian secara administratif terletak di dua kecamatan yaitu desa Jelutih dan Hajran di Kecamatan Batin XXIV. Sementara itu, desa Padang Kelapo dan Sungai Ruan Ulu terletak di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Desa-desa ini termasuk desa penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas terletak di Kabupaten Batanghari. Desa Jelutih mempunyai luas wilayah 9.900 ha dan berpenduduk 2.698 jiwa. Sebelah utara

berbatasan dengan desa Durian Luncuk, selatan berbatasan dengan desa Mandiangin, barat dengan Maro Sebo Ulu dan timur dengan desa Olak Besar merupakan desa penelitian terjauh dari ibukota kabupaten (61 km) dan ibukota provinsi (121 km). Desa Hajran mempunyai luas wilayah 7.500 ha dan berpenduduk 816 jiwa. Sebelah utara berbatasan dengan desa Mata Goal, selatan berbatasan dengan desa Aur Gading dan desa Paku Aji, barat dengan Batas TNBD dan timur dengan Maro Sebo Ulu. Desa Padang Kelapo mempunyai luas wilayah 3.513 ha dan berpenduduk 1.407 jiwa. Sebelah utara berbatasan dengan desa Renah Sago, selatan berbatasan dengan desa Sei. Lingkar, barat dengan HP Inhutani V dan timur dengan desa Rantau Gedang. Desa Sungai Ruan Ulu mempunyai luas wilayah 5600 ha dan berpenduduk 2.357 jiwa. Sebelah utara berbatasan dengan desa Rantau Gedang, selatan berbatasan dengan desa Hajran, barat dengan Sungai Lingkar dan timur dengan desa Sungai Ruan Ilir.

2. Kelembagaan Sosial dan Ekonomi di Desa-desanya Penelitian

Secara umum kelembagaan sosial seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LMD) secara formal telah terbentuk, namun dalam hal kinerja tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, bahkan ada kesan keberadaannya masih di bawah koordinasi oleh aparat pemerintahan desa. Hal ini juga menjadikan peran aparat pemerintahan desa lebih dominan dalam mengatur dan melaksanakan kinerja pembangunan desa.

Lembaga pendidikan utama yang terdapat di desa penelitian adalah sekolah dasar negeri (Inpres) dan sekolah agama berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat. Kondisi fasilitas pendidikan jika dilihat per desa menunjukkan kondisi yang berbeda, baik dari jumlah murid dan guru sekolah. Pada Madrasah Ibtidaiyah, desa Sungai Ruan Ulu saat ini tidak aktif

lagi akibat keterbatasan swadaya dari masyarakat. Dari keempat desa penelitian ternyata fasilitas kesehatan dan keberadaan paramedis hanya terdapat di desa Jelutih dan Hajran. Desa Padang Kelapo dan Sungai Ruan Ulu tidak mempunyai fasilitas kesehatan hal ini menjadikan kedua desa tersebut rentan terhadap masalah kesehatan dan pengetahuan akan gizi masyarakat.

B. Karakteristik Responden

Berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 143 orang (94%) dan perempuan sebanyak 10 orang (6%). Dilihat dari rata-rata tanggungan keluarga maka di desa Hajran sebesar 4,76 jiwa, desa Jelutih sebesar 4,41 jiwa, desa Padang Kelapo sebesar 6,68 jiwa dan desa Sungai Ruan Ulu sebesar 4,18 jiwa. Responden di desa Padang Kelapo mempunyai tanggungan keluarga yang lebih banyak dibanding dengan ketiga desa lainnya, karena terdapat beberapa kecenderungan pada rumah tangga. Kecenderungan itu antara lain adalah banyak anggota keluarga menjadi janda (± 63 orang) menjadi tanggungan keluarga inti, demikian juga dengan penduduk lanjut usia dan masih bergabungnya beberapa Kepala Keluarga (KK) dalam satu rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Padang Kelapo rentan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) apabila tidak diantisipasi dengan berbagai program pemberdayaan.

Tingkat pendidikan responden dilihat dari lamanya bersekolah atau pendidikan formal yang ditempuh. Dari 153 responden di 4 desa terlihat bahwa 19 orang atau 8,67 % tidak pernah menempuh pendidikan di tingkat dasar (SD/MI), sebanyak 109 orang atau 71,33 % pernah menempuh pada pendidikan tingkat dasar (tidak tamat dan tamat SD/ MI) yang merupakan pendidikan tertinggi mayoritas responden. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan ketidaksediaan fasilitas sekolah menengah yang dekat dengan desa penelitian untuk melanjutkan pada pendidikan menengah anak-anak di desa penelitian paling tidak harus bersekolah di kota kecamatan. Di sisi lain, anak selepas pendidikan dasar bagi masyarakat desa-desanya penelitian mulai dapat memberikan

sumbangan produktif kepada penghasilan keluarga. Sehingga apabila si anak berada di sekolah akan berarti hilangnya sejumlah penghasilan yang sedianya dapat dihasilkan oleh si anak tersebut bila ia menggunakan waktunya untuk bekerja di tanah pertanian keluarga. Hal ini menurut Todaro (1993:467) dinamakan biaya pendidikan yang bersifat tidak langsung (*opportunity cost of education*). Dan hanya sebanyak 18 orang (12%) responden yang pernah dan tamat pada pendidikan lanjutan pertama dan 10 orang (6,67%) pernah menempuh pendidikan lanjutan tingkat atas, sedang sisanya pernah menempuh pendidikan tinggi setara akademi.

Mata pencaharian utama yang digeluti lebih didominasi oleh *pertama*; orang yang beraktivitas sebagai petani karet berjumlah 97 orang (64,67%) dan *kedua*, orang yang beraktivitas sebagai pembalok berjumlah 26 orang (17,34%). Jika dilihat untuk masing-masing desa, sebagai petani karet lebih banyak dilakukan oleh responden di desa Jelutih yaitu 34 % dari total responden, diikuti oleh Padang Kelapo yaitu 14%, dan Sungai Ruan Ulu sebanyak 12 persen, sementara Hajran hanya 4,67 persen. Aktivitas sebagai pembalok banyak ditemui di Sungai Ruan Ulu (13,34 %), Hajran (2,67 %) dan Jelutih (1,34 %). Aktivitas ini tidak ditemui pada responden di Desa Padang Kelapo.

Untuk aktivitas di luar petani karet dan pembalok bervariasi antara 0,67 – 2 % dari 150 responden yang meliputi antara lain sebagai peternak, buruh (angkut balok, bangunan, mencuci pakaian), berdagang, PNS/ Guru, jasa penyeberangan, ojek, opera-

tor *chain shaw*, Sopir, Tukang kayu, Tauke (balok, karet) dan tidak bekerja sama sekali.

C. Kepemilikan dan Kondisi Lahan, Produksi, Pemasaran dan Sistem Pembayaran

Responden di desa Hajran yang menyatakan memiliki lahan sebesar 88,24%, desa Jelutih sebesar 88,52%, desa Padang Kelapo sebesar 92,86% dan desa Sungai Ruan Ulu sebesar 61,35%. Berdasarkan persentase ini, terlihat bahwa responden yang tidak memiliki lahan yang tertinggi adalah di Desa Sungai Ruan Ulu (38,64%) hal ini disebabkan sebagian besar masyarakatnya masih bertumpu kepada pemanfaatan sumber daya alam hutan meskipun pemanfaatannya secara *ilegal* di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Dari 153 orang responden di 4 desa yang menjadi lokasi penelitian, kepemilikan lahan pertanian dibagi menjadi kepemilikan lahan perkebunan karet, lahan sawah, lahan perkebunan kelapa sawit, belukar (belukar tua dan belukar muda), sesap, kepemilikan lahan dan sama sekali tidak mempunyai lahan. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan lahan perkebunan karet lebih mendominasi dengan jumlah responden sebanyak 109 orang atau 71,34%. Jika dilihat dari prosentase kepemilikan lahan karet untuk masing-masing desa, di desa Jelutih sebanyak 85,25%; 76,47% dari responden yang ada di desa Hajran, sedangkan di Padang kelapo dan S. Ruan Ulu yang menyatakan memiliki lahan karet masing-masing 71,43% dan 50% dari total responden di desa tersebut. Lebih rinci kepemilikan lahan karet berdasarkan luasannya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Kepemilikan Lahan Karet

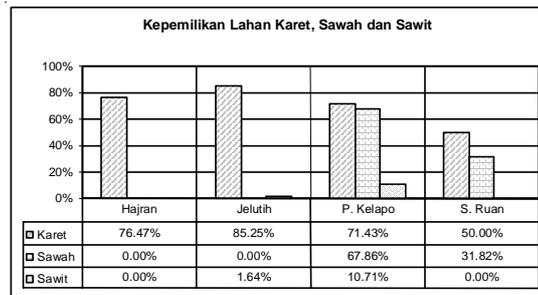
Desa	Luas (ha)			
	0 –2 (%)	2 – 5 (%)	5 –10(%)	> 10 (%)
Hajran	61,54	23,08	0	15,38
Jelutih	19,23	48,08	21,15	11,54
Padang Kelapo	5	55	10	30
Sungai Ruan Ulu	54,55	27,27	13,64	4,55

Sumber : diolah dari data primer

Dari tabel tersebut menunjukkan di desa Hajran sebesar 61,54% responden luasan kebun karet 0-2 ha, luasan 2-5 ha dan > 10 ha masing-masing 23,08% dan 15,38%. Di desa Jelutih didominasi luasan lahan 2-5 ha yaitu sebesar 48,08 ha, sedangkan 5-10 ha sebesar 21,15%. Sedangkan di Padang Kelapo sebanyak 55% memiliki lahan karet seluas 2-5 ha dan 30% dengan luasan lebih dari 10 Ha. Sementara itu desa S. Ruan Ulu didominasi pemilik lahan seluas 0-2 ha yaitu 54,55 %, sedangkan yang mempunyai lahan karet lebih dari 10 ha hanya 4,55 dari responden yang ada. Berdasarkan grafik 1. sebanyak 33 orang atau 18,67 persen dari total responden menyatakan memiliki lahan sawah. Jika dilihat per desa responden terbanyak yang memiliki lahan sawah terdapat di desa Padang Kelapo (67,86%), disusul desa Sungai Ruan Ulu (31,82%). Sedangkan desa Jelutih dan Hajran tidak ditemui responden yang mempunyai lahan sawah. Sedang luasan sawah responden tersebut untuk di Padang Kelapo cukup merata, yaitu kurang 1 ha sebanyak 21,05%, 1-5 ha sebesar 31,57%, dan 5-10 ha serta lebih dari 10 ha masing-masing 26,31% dan 21,05%. Sedangkan di desa S. Ruan Ulu rata-rata responden mempunyai luasan sawah 1-5 ha sebesar 64,28% dan untuk sawah seluas 0-1 ha sebesar 35,71% dari responden yang memiliki sawah. Mengenai kepemilikan lahan kelapa sawit dari 150 responden yang menyatakan memiliki sebanyak 3 orang atau 10,7% di Desa Padang Kelapo, Desa Jelutih sebanyak 1 orang (1,63%). Besarnya produksi

karet, ada perbedaan jika menyadap pada karet sendiri dengan menyadap karet orang lain, dan juga tergantung dengan periode bulan basah atau bulan kering pada saat penyadapannya.

Grafik 1. Kepemilikan Lahan Karet, Sawah dan Sawit



Sumber: diolah dari data primer

Di desa Hajran pada saat bulan basah untuk karet sendiri dapat dihasilkan sebanyak rata-rata 226,67kg/bulan, sementara untuk karet orang lain dapat dihasilkan sebanyak 405 kg/bulan. Pada bulan kering, penyadapan karet milik sendiri menghasilkan 420 kg/bulan, sementara untuk karet orang lain dihasilkan 592,22 kg/bulan. Hal yang agak mencolok terjadi di desa Padang Kelapo, dimana pada periode bulan basah penyadapan karet milik sendiri sebanyak 266,67 kg/bulan sementara untuk karet milik orang lain hanya menghasilkan 52 kg/ bulan. Pada bulan kering dihasilkan 605 kg/bulan karet milik sendiri sementara untuk karet orang lain hanya 357,78 kg/bulan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Produksi Karet Responden Berdasarkan Periode Bulan Basah dan Bulan Kering

Desa	Karet Sendiri		Karet Orang Lain	
	Bulan basah (Kg)	Bulan kering (Kg)	Bulan basah (Kg)	Bulan kering (Kg)
Hajran	226,67	420	405	592,22
Jelutih	213	345,29	324,28	463,39
Padang Kelapo	266,67	605	52	357,78
Sungai Ruan Ulu	150	150	193,34	340

Sumber: diolah dari data primer

Angka produksi karet tersebut, terutama karet milik orang lain masih harus dibagi antara untuk penyadap dengan pemiliknya. Dari pernyataan responden kecenderungan tentang sistem bagi hasil/desa, untuk desa Hajran dan Jelutih memakai pola 1:2 yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik tanaman karet dan 2 (dua) bagian untuk penyadap. Sedangkan desa Padang Kelapo dan Sungai Ruan Ulu pola umum yang dipakai adalah 1:3 1 (satu) bagian untuk pemilik tanaman karet dan 3 (tiga) bagian untuk penyadap.

Pemasaran hasil karet masyarakat umumnya dilakukan di desa karena pada empat desa penelitian terdapat pedagang pengumpul dan cenderung menjual pada satu pedagang pengumpul tertentu (tauke). Jika

dilihat alasan yang dominan menjual getah ke tauke; di Hajran sebanyak 5 responden dari 7 responden yang berkegiatan menyadap karet (71,43%) beralasan bahwa itu karet tauke. Alasan yang sama sebesar 39,21% responden ditunjukkan di Jelutih. Disusul dengan alasan telah mendapat pinjaman/hutang dari tauke yaitu sebesar 31,37%. Di Padang Kelapo alasan yang dominan adalah karena karetanya milik tauke (47,62%) sedangkan pemotong karet telah mendapat pinjaman dari tauke sebesar 19,05%. Sementara itu di S. Ruan Ulu mayoritas pemotong menjual ke tauke tertentu karena alasan harga yang tinggi (44,44 %) dan yang menjual secara bebas, tidak terikat pada tauke tertentu sebesar 33,33 %. Rincinya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden di Daerah Penelitian Berdasarkan Alasan Menjual Karet Pada *Tauke* di Desa.

Alasan menjual ke toke sekarang	Hajran	Jelutih	P. Kelapo	S. Ruan	Total
Keluarga	1	2		1	4
Bisa ambil belanja	1	1			2
Dapat pinjaman		16	4	2	22
Dekat kebun		1	1		2
Dijemput Toke			2		2
Harga dianggap layak		7	2	8	17
Karet toke	5	20	10	1	36
Mudah berunding		1			1
Terikat jasa sosial		1			1
Tidak ada modal			1		1
Jual Bebas (<i>tidak tergantung toke tertentu</i>)		1	1	6	8
Total	7	51	21	18	97

Sumber : diolah dari data primer

Adapun sistem pembayaran dari pola penjualan karet kepada *tauke* di empat desa yang diteliti memperlihatkan adanya kecenderungan membayar tunai kepada penyadap dan membayar selisih antara nilai penjualan dengan pinjaman yang telah diberikan kepada penyadap sebelumnya. Pinjaman berupa kebutuhan sehari-hari yang diambil oleh penyadap dari *tauke* yang bersangkutan. Sebanyak 57,14% responden yang berkegiatan ekonomi karet di Desa Hajran menerima pembayaran tunai, di Padang Kelapo sebanyak 90,48% dan 77,7 % di S. Ruan Ulu. Sementara di Jelutih hanya 19,61 % yang menyatakan mendapatkan pembayaran tunai dari penjualan hasil karetnya, sedangkan mayoritasnya (80,39 %) berupa pinjaman terlebih dahulu kepada *tauke*.

D. Prospek Ekonomi Desa

Berdasarkan luasan kebun karet yang dimiliki oleh responden di empat desa yang diteliti maka didapatkan gambaran tentang prospek ekonomi ke depan terutama dari sektor tanaman karet. Dilihat dari per desa yang paling tinggi adalah Hajran dimana kepemilikan karet usia 1-5 tahun dan 5-10 tahun masing-masing 35,29 % dan 23,53 %. Sedang yang paling menguatirkan adalah Sungai Ruan Ulu dimana kepemilikan kebun karet usia 1 - 5 tahun hanya 4,54 %, sedangkan 5-10 tahun 18,18 % dari responden yang ada. Lebih lengkapnya bisa lihat tabel 5. berikut:

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Sistem Pembayaran Penjualan Karet Pada *Tauke* di Desa

Desa	Tunai		Pinjaman		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Hajran	4	57,14	3	42,86	7	100
Jelutih	10	19,61	41	80,39	51	100
P. Kelapo	19	90,48	2	9,52	21	100
S. Ruan Ulu	14	77,78	4	22,22	18	100

Sumber : diolah dari data primer

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan Karet yang Belum Disadap dan Umur Tanaman

Desa	Tahun Umur Tanaman Karet					
	1 - 5		5 - 10		> 10	
Hajran	6	35,29 %	4	23,53 %	1	5,88
Jelutih	16	26,22 %	10	16,39 %	0	-
P. Kelapo	3	10,71 %	2	7,14 %	0	-
S. Ruan	2	4,54 %	8	18,18 %	0	-

Sumber : diolah dari data primer

Sedangkan jika dilihat dari kepemilikan karet responden yang belum disadap; di desa Jelutih didapati 42,62 %, Sungai Ruan Ulu dijumpai 22,73 %. Sementara desa Padang Kelapo dari 28 reseponden hanya 2,5 % yang memiliki tanaman karet belum disadap. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa keadaan responden di desa Padang Kelapo untuk 5 tahun ke depan akan tetap berada dibawah dari responden di tiga desa lainnya. Di samping bergerak dalam aktivitas ekonomi utama di usaha pertanian dan perbalokan, ditemukan juga beberapa responden yang bekerja di luar sektor pertanian (*non-farm*) walaupun saat ini masih bersifat sebagai usaha sampingan. Usaha sampingan di desa Jelutih terbanyak adalah dagang yaitu 4 responden (6,56 %), sedangkan di Sungai Ruan Ulu adalah dagang dan ojek masing-masing 3 orang (6,82 %).

E. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang di desa tergambar dari berbagai kegiatan masyarakat di desa penelitian. Secara fisik kegiatan ini dapat dibedakan menjadi kegiatan yang berada di lingkungan desa dan di luar lingkungan desa. Kegiatan di luar lingkungan desa pada kenyataannya merupakan tempat yang digunakan oleh masyarakat secara bersama, berupa interaksi antara desa. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan desa antara lain digunakan untuk kegiatan: sawah, ladang, penggembalaan, kebun karet, kebun sawit dan belukar secara historis masing-masing kegiatan ini berbeda latar belakangnya antara satu desa dengan desa penelitian lainnya.

1. Sawah

Sawah diartikan sebagai hamparan yang digunakan petani untuk bercocok tanam pangan, utamanya padi yang menggunakan irigasi maupun tadah hujan. Di desa Padang Kelapo hamparan sawah terdapat belakang perkampungan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah adalah 112 ha. Dengan kondisi sekarang, sawah yang dapat diairi oleh irigasi adalah 90 ha.

Masyarakat desa Sungai Ruan Ulu melakukan kegiatan bersawah bersama-sama dengan penduduk Sungai Lingkar

pada hamparan yang bersifat tadah hujan. Pada musim hujan atau pasang naik masyarakat mengharapkan akan turun ke sawah karena lahan dapat diolah. Akan tetapi jika musim hujan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat mendatangkan bencana. Masyarakat desa Hajran tidak mempunyai kegiatan bersawah dari penjelasan masyarakat desa, kebiasaan bersawah ditinggalkan masyarakat ketika kegiatan *bebalok* (memanfaatkan hasil hutan berupa kayu) marak terjadi.

2. Ladang

Kegiatan berladang masyarakat terlaksana dengan pola subsisten, hampir tidak ditemui adanya hamparan khusus yang digunakan untuk berladang. Kehidupan berladang menjadi langka bukan saja karena pengetahuan masyarakat tentang pengembangan tanaman kurang, akan tetapi juga dikarenakan intensifnya gangguan dari berbagai ternak seperti kerbau dan kambing. Oleh karena itu tidak mengherankan kendala masyarakat dalam mengembangkan ladang adalah karena adanya ancaman dari berbagai jenis ternak yang ada di desa. Ladang termasuk sawah pada kenyataannya harus diberi pagar agar terhindar dari gangguan ternak-ternak yang ada didesa.

3. Kebun karet

Kebun karet merupakan wilayah peruntukan lahan terbesar di desa-desa penelitian. Hampir seluruh kebun karet menggunakan bibit lokal, yang lebih dikenal dengan bibit *sapuan*. Produktivitas rata-rata pernyadap 1,25 kuintal/minggu untuk luas lahan kira-kira 2 ha, dengan hari kerja selama lima hari dalam seminggu.

F. Aksesibilitas Desa

Aksesibilitas yang menonjol di desa-desa penelitian adalah adanya keterjangkauan masyarakat terhadap sumber daya hutan yang terletak di Taman Nasional Bukit Duabelas. Sumber daya ini menjadi pusat aktivitas masyarakat desa-desa penelitian. Surat

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.258/Kpts-II/2000 pada tanggal 23 Agustus menyebutkan, antara lain bahwa kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) berasal dari perubahan fungsi sebagian hutan produksi terbatas Serengam Hulu seluas 20.700 ha dan sebagian hutan produksi tetap Serengam Hilir seluas 11.400 ha serta penunjukan sebagian areal penggunaan lain seluas 1.200 ha dan kawasan suaka alam dan pelestarian alam (cagar biosfer) seluas 27.200 ha, dengan demikian luas TNBD menjadi 60.500 ha.

Sebagai Taman Nasional maka TNBD ditujukan sebagai kawasan pelestarian jenis dan ekosistem, aspirasi generasi mendatang, ilmu dan pengetahuan dan teknologi, edukasi, rekreasi dan budaya. Pada saat ini arah pembukaan lahan (perladangan dan kebun karet) penduduk desa interaksi tersebut lebih banyak ke arah kawasan TNBD. Masyarakat desa Paku Aji dan Hajran banyak yang membuka lahan di kiri kanan mudik daerah Sungai Serengam sampai ke Muara Sungai Terab dan di sekitar daerah Sungai Nemantan (areal perkebunan sawit PT. SDM), sedangkan penduduk desa Jelutih banyak yang membuka lahan (sekitar 80 KK) antara Sungai Serengam (sampai ke Sungai Bangkai Anjing) dan Sungai Jelutih, atau di dalam dan sekitar areal HTI PT. Wana Perintis dan perkebunan sawit PT. EMAL. Daerah hulu Sungai Jelutih dan Sungai Bangkai Anjing menjadi daerah perebutan pembukaan lahan dengan Desa Baru Kecamatan Pauh.

Masyarakat desa sebagian besar memanfaatkan sumber daya hutan berupa kayu (*bebalok*) untuk sumber penghasilan dan pendapatan. Kegiatan *bebalok* biasanya dilakukan oleh bujangan dan kepala keluarga yang masih berusia muda atau masih besar kekuatan fisiknya. Masyarakat desa menganggap bahwa sumber daya hutan masih cukup tersedia antara 2–3 tahun lagi dan didukung oleh permintaan kayu masih terus mengalir, termasuk kehadiran pabrik sawmill yang aksesnya relatif dekat dengan desa mereka. Keberadaan Sawmill terdapat di desa Muara Jangga 1 (satu) pabrik *sawmill* (pengolahan kayu menjadi papan) dan desa Teluk Leban ada 4 (empat) pabrik *sawmill* dan di desa Sungai Rengas ada 1 (satu) pabrik *sawmill*.

G. Infrastruktur Ekonomi

Sarana ekonomi di pedesaan dirancang oleh pemerintah dengan menggunakan Koperasi Unit Desa (KUD). KUD diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi desa, meningkatkan posisi tawar masyarakat desa terhadap pelaku ekonomi pada jenjang perekonomian yang lebih tinggi. Pada masa lalu diperoleh bukti keberadaan KUD sebagai alat penggerak ekonomi di desa-desa penelitian. Selain dengan KUD, pembenahan kelembagaan di pedesaan juga dilakukan melalui perangkat pemerintahan desa yang menginisiasi dan mengelola berbagai program pembangunan di perdesaan. Keadaan sarana ekonomi ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Sarana Ekonomi KUD, Individu dan Perangkat Kades Pada Masing-Masing Desa Lokasi Penelitian

No	Desa	KUD (Past)	KUD (Existed)	Warga Desa Secara Individu	Perangkat Kades
1	Padang Kelapo	-	-	Toke Balok dan getah	-
2	Sungai Ruan Ulu	Ruan Putra	-	Toke Balok dan getah	-
3	Hajran	Empat Sekato	-	Toke Balok dan getah	Simpan pinjam PKK
4	Jelutih	Harapan Sejahtera	-	Toke Balok dan getah	-

Sumber : Hasil penelitian

Masing-masing koperasi di desa penelitian mempunyai peranan yang hampir sama, keberadaannya hanya rangka memanfaatkan sumber daya hutan. Di desa Sungai Ruan Ulu terdapat Koperasi Ruan Putra yang mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Peran Koperasi bagi pembangunan desa hanya terbatas menyediakan dana untuk membangun Mesjid dan Kantor Kepala Desa dari hasil penerimaan di bidang perikanan.

Demikian juga dengan Hajran terdapat Koperasi Empat Sekato yang pada akhirnya juga tidak mendapat tempat di masyarakat karena dicurigai hanya mengambil keuntungan untuk koperasi itu sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat desa.

H. Kegagalan-Kegagalan Program-Program Pembangunan Desa

Program pembangunan yang pernah dialami oleh desa-desa penelitian adalah program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Keempat desa penelitian masuk dalam kategori Desa Tertinggal yang mempunyai pengalaman sama yaitu gagal dalam menjalankan program tersebut. Dari hasil pendalaman terhadap berbagai kegagalan ini dapat dijelaskan penyebab-penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Bidang usaha yang dipilih oleh Kelompok Masyarakat merupakan bidang usaha yang tidak didukung oleh kompetensi masyarakat untuk mengembangkannya. Sebagaimana digariskan bahwa jenis komoditi yang dikembangkan dalam program IDT adalah jenis komoditi yang mudah dipasarkan *marketable* akan tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak mempunyai keahlian dalam mengelola jenis komoditi yang dikembangkan. Jenis komoditi yang pernah dikembangkan di empat desa ini antara lain adalah ternak sapi, kambing, keramba dan tanaman semusim seperti cabai.
- b) Kegagalan juga dikarenakan tidak adanya penyiapan kelembagaan di tingkat desa yang mampu mengelola Kelompok Masyarakat (Pokmas) dimana setiap penerima terhimpun. Kegagalan ini ditambah lagi bahwa secara program, IDT "terputus" dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

- c) Praktek-praktek "kolusif" juga menjadi salah satu penyebab kegagalan IDT. Pengadaan sapi, dan kambing diketahui oleh masyarakat tidak sesuai dengan kriteria yang disusun bersama oleh kelompok.

Dari hasil *workshop* yang adakan di empat desa penelitian muncul keinginan masyarakat untuk turut serta dalam membudidayakan kelapa sawit. Keinginan ini berkaitan dengan program kabupaten Batanghari yang merencanakan akan menjadikan desa-desa penelitian untuk dijadikan daerah tujuan transmigrasi dengan komoditas adalah kelapa sawit. Kedua hal ini disebabkan dengan kenyataan:

- a) keinginan masyarakat untuk mempunyai lahan sawit sangat tinggi, dengan alasan bahwa keempat desa ini merupakan desa yang tidak terjamah oleh program pemerintahan kabupaten Batanghari dalam membudidayakan sawit.
- b) Bila dilakukan program transmigrasi, maka ke empat desa ini sangat berharap bahwa mereka terlibat ke dalam bentuk program yang akan dilaksanakan dengan harapan program membawa perubahan kehidupan masyarakat setempat terutama setelah hutan sudah tidak dimanfaatkan lagi.

Masyarakat memang tertarik untuk menanam sawit dengan berbagai program kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit akan tetapi masyarakat desa Hajran mempunyai pengalaman pahit dengan PT. Sawit Desa Makmur yang hanya mengambil keuntungan dari pengambilan kayu-kayu dari lahan yang akan disiapkan menjadi lahan kebun sawit.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapatlah ditarik berbagai kesimpulan karet merupakan komoditas potensial pengembangannya bagi desa-desa sekitar hutan di kabupaten Batanghari. Hal ini disebabkan masyarakat sudah berpengalaman dalam membudidayakan komoditas ini terbukti

dengan mata pencaharian masyarakat yang mayoritas petani, kepemilikan kebun karet, luasan peruntukkan wilayah untuk kebun karet namun masyarakat masih ada yang tergiur untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu ilegal yang diambil dari Taman Nasional Bukit Duabelas karena adanya desakan kebutuhan hidup dan pendapatan yang besar walaupun sesaat.

Ada beberapa kendala sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat dalam membudidayakan karet antara lain; terjebak dengan pinjaman tauke sehingga harga di masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar sementara keberadaan KUD belum begitu dapat diterima masyarakat.

B. Rekomendasi

Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dilakukan masyarakat sekitar hutan dengan mengandalkan budidaya karet merupakan sumber ekonomi jangka panjang oleh karena itu berbagai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus lebih berorientasi pada sumber daya lokal tanpa mengesampingkan aspek ekologi yang ada. Namun untuk budidaya karet bukan hanya bagaimana cara menanam karet yang baik dengan pemilihan bibit unggul, pemberian pupuk dan pembasmian hama akan tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang masih terjerat dengan pinjaman *tauke* sementara infrastruktur KUD belum dapat di terima sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu pembenahan KUD dan pembenahan berbagai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1997. *Evaluasi Pelaksanaan Pelita VI Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. Laporan akhir*, Kerjasama Bappeda Tingkat I Jambi dengan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- , 2000. *Kecamatan Bathin XXIV dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, Muara Bulian
- , 2000. *Kecamatan Maro Sebo Ulu dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, Muara Bulian
- Arifin, B. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia, Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan*, Erlangga, Jakarta.
- Redclift, M., 1987. *Sustainable Development: exploring the contradictions*, Methuen, London and New York.
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Todaro, Michael, 1999. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta
- Tyler, Sthepen, R. 1999. *Policy Implication Of Natural Resource Conflict Management*, in Buckle, D, Editor *Cultiating Peace Conflict And Collaboration in Natural Reource Management*, The World Bank.

BIODATA PENULIS :

Habibullah, Menyelesaikan kuliah di Jurusan Ilmu Sosiatri Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003, sempat bekerja sebagai Fasilitator Desa di Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi (KKI-Warsi) LSM Program *Habitat and Resources Management for the Kubu*, sekarang sebagai Staf Bidang Program Puslitbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.